



Cirebon Katon

Berita & Informasi Wakil Rakyat



Menuju Bebas Sampah

Sambutan Positif



Alegandri 0103

Tak terasa, langkah kaki ini sudah menapaki empat edisi. Masih seumur jagung. Namun, penuh dinamika, baik eksternal maupun internal. Eksternal tentu saja salah satunya pandemi covid-19.

Berbagai pembatasan kegiatan tentu saja sedikit menyulitkan kami dalam memproduksi majalah ini. Mulai dari penyediaan konten, reportase, wawancara, pemotretan, dan proses pencetakan. Meski demikian, kondisi itu justru membuat kami makin dinamis, terpacu, dan bersemangat.

Sedangkan dinamika internal lahir dari semangat untuk terus menyajikan yang terbaik. Eksplorasi ide, diskusi, dan adu argumen kerap terjadi di sela-sela menyiapkan konten dan tampilan majalah. Lega dan senyum bersama adalah ujung dari pergulatan itu.

Terlepas dari itu semua, yang tak kalah spesialnya adalah sambutan pembaca dan para pemangku kepentingan di Kabupaten Cirebon. Beberapa ada yang menyampaikan langsung, ada juga yang melalui korespondensi dan media teknologi informasi.

Tidak terpikirkan sebelumnya oleh kami, sambutan positif itu di luar perkiraan kami. Tentu saja ini memacu semangat kami, dan mudah-mudahan tidak membuat kami berbangga diri. Kami sadar produk ini masih jauh dari kesempurnaan.

Sambutan positif yang sangat berharga itu berupa kritikan dan masukan bagi perbaikan majalah ini. Ada banyak usulan rubrik baru dan konten yang perlu ditampilkan di majalah ini. Kami sangat berterimakasih.

Hingga kini kami masih menggodok berbagai usulan itu. Terutama dari aspek kesinambungan rubrik, dukungan sumber daya, dan ketersediaan halaman. Mudah-mudahan ke depan akan ada rubrik-rubrik baru sesuai dengan masukan dari pembaca.

Ini akan menjadi bagian dari dinamisitas perbaikan majalah. Tentu saja kami tidak akan berhenti berinovasi. Untuk itu segala masukan dari pembaca juga kami harapkan akan terus mengalir. Kami tunggu usulan, masukan, dan kritikan berikutnya. Selamat membaca.

Pembina/Penasehat :

H. Mohamad Luthfi, ST, M.Si
(Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Rudiana, SE
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Teguh Rusiana Merdeka, SH
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Drs. H. Subhan
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Pengarah :

Muklisin Nalahudin, SH, MH.
(Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kab. Cirebon)

Munawir, SH.
(Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kab. Cirebon)

Abdul Rohman
(Ketua Komisi 1)

Mad Saleh
(Ketua Komisi 2)

H. Hermanto, SH
(Ketua Komisi 3)

Drs. H. Rasida Edy Priatna, MM
(Ketua Komisi 4)

Pimpinan Umum/Pimpinan Redaksi :

Ikin Asikin, S.Sos, M.Si
(Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon)

Wakil Pimpinan Redaksi :

Drs. Raden Chaidir Susilaningrat
(Kabag persidangan)

Drs. H. Sucipto, MM
(Kabag Perundang-undangan)

Redaktur Pelaksana :

Mochammad Nurhiyana, S.STP., M.Si
(Kasubag Humas dan Protokol)

Redaksi Ahli :

S. Yudi

Penyunting :

Wiwin Winarti, S.IP
(Kasubag Rapat dan Risalah)

Ardiles Afla Jatiwanto
(Kasubag Rumah Tangga)

Redaktur :

IA Fazri

Reporter :

Firman • Maulana • Adi • Yusuf • Mahardika

Fotografer :

Alfian

Desain Grafis :

Boyke Datu • Andri

Data dan Riset :

Oman • Ihsan

Distribusi :

Adiw

Korespondensi :

redaksi.cika@gmail.com

Penerbit :

Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon
Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber Cirebon
• Telp. 0231 32150 • Kode Pos 45611



04 | FOKUS

Melangkah Menuju Bebas Sampah

10 | Kopleng Sulap Sampah Jadi Pakan Lele



14 | KILAS

Menuju Aplikasi e-perencanaan



18 | PUBLIKA

Kapan Sekolah Mulai Dibuka?



20 | LENSA

Kerajinan Gerabah Bertahan di Tengah Arus Zaman



22 | DINAMIKA KOMISI

Membenahi Ujung Tombak Pemerintahan

24 | Pembangunan Pasar Pasalaran Tak Kunjung Usai

26 | Bersolek Sambut Wisatawan

28 | DPRD Minta Peserta Didik Wilayah Perbatasan Diperhatikan



30 | PROFIL

Muhamad Teguh Rusiana Merdeka
Keyakinan Diri Sebagai Kunci Sukses



33 | INSPIRASI

Wisata Batu Lawang Cupang
Ikon Baru Cirebon Nan Menjulung

36 | POTENSI

Wisata Religi: Kaya Nilai Belum Berbingkai

Melangkah Menuju Bebas Sampah

Cirebon darurat sampah. Padahal, sampah berpotensi menciptakan lapangan usaha. Perlu tata kelola yang komprehensif. Sayang, Perda yang ada sudah usang, tak mampu menjawab persoalan.



foto: foto alifan/d

Mei 2018, warga perbatasan Cirebon-Brebes berkumpul di tepi Sungai Cisanggarung. Masyarakat yang kebanyakannya dari Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, itu menyambut rombongan petugas Pemkab Cirebon. Hari itu akan dilakukan penutupan secara permanen Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Ciledug.

Warga pun menyambut dengan bahagia, ketika petugas tiba di lokasi. Tak butuh waktu lama, setelah tiba di lokasi, petugas yang dipimpin Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), didampingi anggota Polri dan TNI, langsung memasang segel di pintu masuk TPAS. Mereka pun menyatakan bahwa lokasi pembuangan sampah itu resmi ditutup.

Spontan warga bersorak. Beberapa memekikan takbir. Bukan tanpa alasan mereka berpanas-panasan di hari puasa menyambut penutupan itu. Mereka sudah lama menginginkan TPAS yang memiliki luas 11 hektare itu ditutup.

Asap dan abu pembakaran kerap mengganggu lingkungan mereka. Tak hanya itu, bau busuk yang menyengat sering membuat mual. Belum lagi pencemaran sungai, karena lokasinya berada di bibir Sungai Cisanggarung.

Pasca penutupan TPAS Ciledug, Pemkab membuka kembali TPAS Gunung Santri, di Desa Kepuh, dengan pelebaran lahan. Sebelumnya, pada 2016 TPAS di Kecamatan Palimanan itu sempat ditutup karena masa sewa habis. Kini dibuka kembali untuk

menampung sampah dari 40 kecamatan.

Sampai saat ini kabupaten Cirebon belum memiliki TPA mandiri. Karna sejauh ini TPA Gunung Santri pun masih dalam status sewa. "Tiap tahun kita perpanjang masa sewanya. Kalau sewaktu-waktu pemerintah Desa Kepuh tidak mengizinkan, ya sudah Cirebon tak punya TPA sampah lagi," ujar Fitroh Suharyono, Kabid Kebersihan dan Pertamanan DLH Kabupaten Cirebon, saat ditemui Cirebon Katon.

Untuk mengantisipasi gejala masyarakat sekitar TPAS, Pemda mempekerjakan warga sekitar sebagai petugas pengolahan TPA. "Dari 9 petugas, 6 orang berasal dari warga sekitar dengan gaji yang layak," ujarnya. Ia juga memastikan dana sosial untuk warga Kepuh, BPJS dan kesehatan lainnya diutamakan.

"Kalau desa yang menjadi lokasi TPA, harus diutamakan jaminan sosialnya, itu bagian rasa terimakasih pemda kepada masyarakat," lanjutnya. Selain itu, penyemprotan secara intens tiap sore dan penimbunan dengan tanah baru juga terus dilakukan. Hal ini untuk menghindari bau menyengat yang nantinya dapat menimbulkan keresahan bagi warga sekitar.

Saat Cirebon Katon berkunjung, memang kondisi sampah di TPA cukup tertata baik dan tidak begitu bau. Pemisahan jenis sampah juga sudah berjalan. Terbukti banyak berdiri tenda sampah plastik di sekitar TPA. Berbeda dengan TPA yang pernah ada Ciledug.

Sebagian masyarakat yang tidak bekerja pun banyak yang memanfaatkan TPA untuk memilah sampah anorganik yang nantinya dijual. "Sampah



plastik dipilah oleh kita untuk dijual. Tiap setahun sekali kita juga dikasih sembako," ujar Toto Miharto warga Desa Kepuh, kepada Cirebon Katon, saat bertemu di lokasi TPA.

Menurutnya, dalam satu sisi adanya TPA ini bisa memberi nilai ekonomi tambah bagi sebagian warga yang tidak bekerja. Tapi di sisi lain cepatnya kerusakan infrastruktur jalan yang cukup parah karena sering dilalui Armada pengangkut.

Keterbatasan Anggaran

Untuk sementara, TPA Gunung Santri menjadi solusi jangka pendek untuk penampungan sampah. Tetapi, untuk jangka panjang tidak akan berdampak baik. "Karena sejauh ini kita hanya memilah dan memisahkan. Belum ke tahap pengolahan," ujar Fitroh.

Jumlah armada pengangkut

sampah, kata Fitroh, sekitar 50 - 60 truk sehari. Daya tampung TPA berkisar 75.000 ton. "Pintar-pintar kita menatanya, agar tidak cepat penuh." Bahkan, kata Fitroh, belum pernah kebakaran, masyarakat juga tidak merasakan dampak yang begitu buruk," akunya.

Menurut Fitroh, sampah yang ada di TPA Gunung Santri baru 10 persen dari jumlah keseluruhan sampah yang ada di Kabupaten Cirebon. "Kondisi sampah kabupaten Cirebon per orang menyumbang sekitar 0,54 kg per hari. Kalau ditotal sekitar 1.198 ton masyarakat kabupaten Cirebon menghasilkan sampah per harinya. "Kita hanya mampu mengangkut 100 ton per hari ke TPA. Selebihnya ada yang dibakar, ditimbun langsung di TPSS masing-masing," tegasnya.

Lanjutnya, Fitroh memprediksi umur TPA Gunung Santri

hanya bertahan 1,5 tahun lagi. Oleh karenanya ia berharap penanganan sampah harus mulai dilakukan secara serius oleh semua pihak.

“Kalau berkaca pada Perbup sebenarnya penanganan sampah merupakan kewajiban bersama semua pihak, baik dari Camat, Pempdes dan masyarakat. Tetapi *image*-nya seakan ini tanggung jawab DLH saja,” keluhnya.

Fitroh mengatakan Pempdes mempunyai kewenangan untuk membuat TPSS, Camat berkewajiban mengawasi dan mengontrolnya. Sedangkan DLH mempunyai tanggungjawab untuk pengangkutan sampah yang sudah tidak bisa diolah menuju ke TPA. “Nah, bagian sampah yang sudah tidak bisa diolah baru diangkut oleh kita ke TPA.”

Kondisi sampah di Kabupaten Cirebon yang sudah sangat kronis menurutnya, disebabkan kita sudah terbiasa melakukan kebiasaan membuang sampah sembarangan dari hal kecil. Padahal sedari sekolah dasar sampai ke jenjang pendidikan tertinggi, kita sering melihat tulisan bijak soal sampah. Tapi nyatanya hal itu belum mampu menyadarkan kita semua.

Selain itu, kondisi demikian disebabkan pula akibat berdirinya banyak rumah yang tidak mempunyai lahan lebih untuk sampah. “Akhirnya mereka membuang sampah di pinggir jalan, sungai dan sebagainya.” Hal ini juga didorong dari pihak Pempdes yang belum semuanya menyediakan tempat pembuangan sampah sementara.

Lanjutnya, jika permasalahan sampah ini ingin cepat diselesaikan, maka harus melonggarkan anggaran. Menurutnya, pencapaian DLH yang hanya mengangkut sampah hanya 10



persen disebabkan anggaran operasional yang terbatas.

“Kita pernah mengajukan anggaran tambahan anggaran senilai Rp 32 Miliar, untuk mengejar target 15 persen dan penambahan armada angkut. Sejauh ini, kita mempunyai 37 armada, itupun yang layak 35 armada, dan masih terkendala biaya operasional. Namun yang di ACC hanya Rp 12 Miliar saja.

Lebih lanjut, selain kendala anggaran, Fitroh menjelaskan kalau Cirebon ingin bebas sampah secara signifikan. Pertama, harus memiliki TPA mandiri yang secara sah milik Pemkab. “Kalau kita sudah punya lahan TPA sendiri. Maka kita juga bisa bermitra dengan pihak lain untuk menambah jumlah armada. “Karena beberapa pihak yang

pernah ingin bekerjasama selalu menanyakan terkait kepemilikan TPA-nya, jadi hal ini penting juga,” keluhnya.

Peluang Usaha

Selain itu, kata Fitroh, dalam mengelola semua unsur harus terlibat, tidak hanya DLH saja. Apalagi sampah bisa bernilai ekonomi. “Sampah itu sesuatu yang akan terus ada, maka pengelolaan untuk diubah menjadi nilai ekonomi sangat mungkin, Bumdes bisa menjadi ujung tombak pengelolaan di tingkat desa,” tuturnya.

Selain itu, dalam skala besar pengelolaan sampah juga bisa melibatkan pihak swasta. Ini sekaligus menjawab keterbatasan anggaran. “Kalau kita buka peluang untuk itu, maka

akan lebih baik lagi. Ini peran legislatif untuk merevisi total Raperda, agar memasukan poin itu, kerjasama dengan pihak swasta,” jelasnya

Kalau pengangkutan secara konvensional belum juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan penambahan anggaran untuk prasarana. Maka jangan berharap kabupaten Cirebon indah, volume sampah akan bertambah seiring pertumbuhan ekonomi dan penduduk.

“Kalau kita tidak mengelola dengan baik. Ya sudah Cirebon akan kumuh. Kita sudah ketinggalan dengan sarana yang kita miliki, dengan adanya industri, tiap orang akan mengalami kenaikan jumlah sampah sejalan ketika pertumbuhan ekonominya pun naik.”

Perubahan Total Perda

Selain mengatur kerjasama usaha, Fitroh berharap, Perda sampah juga harus mengatur pengelolaan sampah berjenjang dari tingkat desa, kecamatan, hingga TPAS. Perda juga harus mengatur sanksi bagi pemerintah desa yang melanggarnya.

“Saya juga berharap perubahan Perda bisa menekan pihak desa untuk mengelola sampah desa. Karena hasilnya bagus buat desa, seperti Desa Klenganan sudah mampu menghasilkan PAD Rp 4-5 juta dari sampah,” pungkasnya.

Menjawab kebutuhan Perda baru, DPRD Kabupaten Cirebon berinisiatif untuk melakukan perombakan total Perda yang sudah ada. Pada awal tahun DPRD memasukan Perubahan Perda N0 7 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah kedalam Propemperda Inisiatif DPRD tahun 2020.

Hal itu dilakukan, agar Perda dapat mengatur dan mampu menyelesaikan persoalan

sampah secara menyeluruh di Kabupaten Cirebon. Atas dorongan dari berbagai elemen masyarakat, Perda Pengelolaan Sampah dilakukan kajian akademis baru dari para ahli untuk mampu berikan solusi.

“14 Raperda diusulkan oleh DPRD Kabupaten, salah satunya Raperda Pengelolaan Sampah. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan persoalan sampah di Kabupaten Cirebon,” ungkap Mukhlisin Ketua Bapemperda.

DPRD juga berharap persoalan sampah bisa diselesaikan sejak dari rumah. Kemudian dilanjutkan tingkat RT dan RW hingga desa melakukan pengolahan sampah. Salah satunya dengan menyediakan TPS tingkat Desa.

Didalam Raperda juga mendorong adanya pembukaan TPAS baru khususnya untuk wilayah Cirebon Timur. Kemudian akan diatur juga sistem dan mekanisme pengelolaan sampah dari tingkat Desa hingga Kabupaten Cirebon.

Sampai saat ini, DPRD melakukan kajian komparatif dengan melakukan kunjungan ke TPA Gunung Santri dan study banding ke daerah lain dalam rangka mencari solusi untuk menyelesaikan persoalan. DPRD juga menunggu kajian akademis dari Tim Pakar yang kemudian akan dilakukan Paripurna Hantaran Raperda. “Kami berharap persoalan sampah bisa selesai pada tahun 2021,” pungkasnya.

•suf/fal



Butuh Perda yang Relevan

Salah satu penyebab sampah berserak di Cirebon karena payung hukum yang ada dianggap usang. Keterpaduan pengelolaan menjadi kuci Perda baru.



Sebagai masih ada kegiatan manusia, maka akan selalu ada sampah yang dihasilkan. Peningkatan volume sampah juga menjadi keniscayaan yang harus dihadapi. Peningkatan populasi manusia dan pola konsumsi masyarakat yang besar menjadi salah satu penyebabnya.

Peningkatan populasi dan kegiatan manusia harus diimbangi dengan hukum yang aktual. Jika ma-

sih menggunakan Perda yang usang maka tak akan mampu menyelesaikan persoalan. Perda baru menjadi sebuah keharusan.

Untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan dan regulasi sampah yang ada di Kabupaten Cirebon. Redaksi Cirebon Katon mewawancarai Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Hermanto. Berikut petikannya:

Seperti apa proses pengolahan sampah yang ada di Kabupaten Cirebon?

Proses pengolahan sampah yang ada di Kabupaten Cirebon belum bisa dikatakan baik. Karena sejauh ini cara yang dilakukan masih cara lama. Pertama, Masyarakat kita masih membuang sampah sembarangan. Kemudian, masih banyak desa-desa yang belum menyediakan TPS. Kita lihat di sungai, pinggir jalan, bahkan pemukiman dipenuhi sampah, karena belum ada TPS desa.

Di tingkat kabupaten baru ada satu TPA di Gunung Santri di Desa Kepuh, Kecamatan Palimanan, itupun volumenya *overload*. Belum lagi, armada pengangkutan dari DLH (Dinas Lingkungan Hidup, *red*) yang jumlahnya masih sedikit.

Sehingga, pengentasan masalah pengelolaan sampah belum ada peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun.

Sekalipun, DLH sudah mulai mengangkut sampah-sampah yang ada di pinggir jalan. Namun, hal itu tidak efektif untuk jangka panjang, nanti anggarannya akan habis di situ. Oleh karenanya, hal ini harus dilakukan pula dalam skala kecil di tingkat desa dan rumah-rumah.

Lalu, seperti apa kendalanya dalam pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Cirebon?

Dalam pengelolaannya, kendala yang dihadapi terbentur dengan perilaku dan anggaran. Pertama, perilaku dan pola masyarakat yang belum secara sadar untuk membuang sampah pada tempatnya yang secara masih dilakukan. Sehingga penting sekali menyamakan *mindset*.

Padahal, sampah itu mampu menghasilkan nilai ekonomis



Foto: alifan

bagi masyarakat itu sendiri, organik misalnya, bisa dibuat kompos, atau yang anorganik plastik bisa dijual.

Kemudian yang kedua kendala anggaran yang terbatas. DLH tentu membutuhkan anggaran yang tidak kecil. Saat kita berkoordinasi kebutuhan yang harusnya dianggarkan berkisar Rp 30 milyar. Sedangkan yang di-acc (setujui, *red*) hanya Rp 8 milyar.

Ini tentu sangat jauh. Bagaimana Cirebon bisa bebas sampah kalau anggarannya saja minim. Hal ini juga kontradiktif. Di sisi lain kalau DLH tidak mengangkut sampah akan berdampak masalah banjir, penyakit dan sebagainya. Di satu sisi kita ingin Cirebon bebas sampah tapi tidak didukung *support system* sarana prasarana dan anggaran yang maksimal.

Oleh karena itu, kita akan sama-sama mendorong Pemda terkait alokasi anggaran untuk sampah harus lebih tepat lagi. Karena ini sudah kompleks kalau mau bersih ya sekaligus tanggung anggarannya.

Solusi apa yang dihadirkan dari DPRD Kabupaten Cirebon, untuk penanganan sampah?

Solusi yang dilakukan tentu kita akan melalui revisi Ra-

perda tentang sampah. Melalui aspek hukum sangatlah penting terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah, karena dalam mewujudkan upaya pengelolaan sampah yang terpadu, dibutuhkan suatu hukum yang tegas untuk mengaturnya, dari adanya hukum tersebut, maka masyarakat di setiap wilayah akan mengetahui kemana arah pengelolaan sampah yang baik, Perda sampah tahun 2012 sudah tidak relevan sehingga perlu revisi. Saat ini masih proses kajian naskah akademik oleh tim ahli.

Permasalahan sampah harus dibedah dari hulu ke hilir. Dari rumah tangga perlunya kesadaran warga agar mau membuang sampah pada tempatnya. Dari tingkat Desa harus ada kemauan bersama untuk menyediakan tempat sampah yang dianggarkan dari dana desa. Jadi tiap depan rumah warga harus disediakan tempat sampah yang difasilitasi desa melalui APBDes.

Kemudian penyediaan TPS skala desa yang layak di satu titik. Di tingkat hulunya, Pemda berkewajiban mengangkutnya ke TPA. Itu semua harus dilakukan atas sinergitas bersama untuk mengelola sampah dari hulu ke hilir. Tapi itu tidak bisa dikerjakan oleh satu pihak saja namun harus dikerjakan secara bersama.

Tetapi, yang lebih penting saya ulang, adalah *mindset* dan pola masyarakatnya. Karena persoalan sampah adalah sesuatu yang harus dilakukan secara kooperatif.

Kalaupun sampah belum mampu diolah agar menghasilkan nilai ekonomi, minimalnya cukup membuang sampah pada tempatnya. Karena percuma, kalau pengangkutan sampahnya bagus tapi tidak didukung kesadaran partisipatif oleh masyarakat sendiri. •suf

Kopling Sulap Sampah Jadi Pakan Lele

Kopling telah membuktikan pengolahan sampah secara mandiri justru memberikan nilai ekonomi bagi warga. Pengolahan seperti ini hanya membutuhkan fasilitasi dari pemerintah untuk diduplikasi daerah lain.



Berkunjunglah ke RT 05/05 Kelurahan Sumber. Sekilas tidak ada yang aneh. Namun, jika diteliti lebih jauh tentu ada yang beda: tidak ada sampah berceceran di lingkungan. Sampah di area itu sudah diolah menjadi pakan lele.

Adalah Kopling yang memprakarsai lingkungan bersih, sekaligus sampah menjadi bernilai ekonomi. Kopling adalah kependekan dari Komunitas Peduli Lingkungan. Kurang le-

bih sudah empat bulan Kopling mengolah sampah menjadi pakan lele.

Februari 2020, Dangi prihatin melihat sampah hanya dikelola secara konvensional. Terlebih dampak Covid-19 mulai terasa. Beberapa pemuda ada yang pulang kampung karena PHK. Dangi, sang Ketua Karang Taruna Kabupaten Cirebon periode 2016-2021 itu pun berinisiatif untuk membuat pengolahan sampah mandiri.

Ia pun mulai membentuk tim kecil untuk menyusun rancangan dan mengkomunikasikan kepada seluruh warga. Tim itu mulanya hanya berjumlah 8 orang dengan komposisi: Tim Pengarah, Tim Penggerak, Tim Operasional.

"Awalnya hanya 8 orang saja dari latarbelakang berbeda, ada tukang ojek, pedagang, pak RT, kuli, ASN dan sebagainya. Kita punya inisiatif bersama, akhirnya kita buat Komunitas Peduli



-foto ahfian/dk

Lingkungan (Kopling) untuk mengedukasi warga," ungkap Dangi.

Setelah terbentuk komunitas itu, para aktivis lingkungan itu pun mulai berjalan dari rumah ke rumah dengan membawa dua ember besar, untuk bersosialisasi dan mengedukasi warga tentang pemilahan sampah organik dan anorganik dari rumah. Ember itu dibagikan secara gratis untuk warga RT 05 dengan menggunakan uang swadaya.

"Mulanya agak sulit mengedukasi warga dan terjadi pro kontra, karena sudah terbiasa tanpa memilah sampah. Tapi selang beberapa minggu warga pun sudah mulai terbiasa," ujar Mohamad Jaelani, Ketua RT 05.

Setiap tiga hari sekali, para aktivis Kopling mengambil sampah organik dapur berje-

nis sayur-mayur, buah, dan makanan sisa lainnya untuk dibawa ke tempat pengolahan dengan gerobak. "Seminggu 2 kali kita muter ke rumah warga untuk mengambil sampah yang sudah dipisah, biasanya hari Kamis dan Sabtu, kemudian dibawa ke lahan kosong milik salah satu yayasan yang dijadikan tempat pengolahan," terang Ahmad Fauzi, Ketua Kopling.

Di lahan kosong tempat pengolahan itu berdiri tegak satu pos untuk jaga, beberapa kolam terpal dan 2 mesin diesel. Sampah organik yang sudah dikumpulkan itu pun sedikit demi sedikit dimasukan ke mesin pencacah. Kemudian diolah lagi melalui mesin pembentuk ukuran kecil dan dikeringkan selama satu hari, sehingga menghasilkan produk pakan ikan lele. "Mes-

in pencacah milik kita dan mesin pembentuk masih sewa dari warga sekitar," tuturnya.

Langkah berikutnya adalah mencoba pakan lele. Mereka pun membuat kolam lele memanfaatkan kolam kosong di depan rumah Pak Dangi. "Kita beli bibit lele bermodal 300 ribu dari uang iuran warga untuk percobaan pakan lele yang kita buat dari sampah. Ternyata tak disangka lele-lele itu sangat lahap makannya," jelasnya.

Akhirnya, Ia bersama rekan Kopling berinisiatif menambah jumlah kolam ikan dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar tempat pengolahan sampah. Hingga hari ini, Kopling telah memiliki 7 kolam ikan lele yang sudah dipanen 3 kali.

Ketika masa panen, ikan-ikan itu dibagikan kepada warga secara cuma-cuma. "Sekali panen kita bisa menghasilkan 1 kwintal lebih, kita bagikan kepada warga yang berminat. Hal ini bagian dari komitmen Kopling bahwa peternakan ikan lele dan pakannya merupakan milik warga semua," ujar Jaelani.

Mereka meyakini untuk jangka panjang pengolahan sampah itu akan bernilai ekonomi tinggi. Harga pakan lele umumnya sangat mahal, dan olahan sampah menjadi alternatif penggantinya. Diperkirakan bisa menghemat 60 persen. Beberapa kali peternak ikan lele datang, dan siap membeli produk mereka. "Namun belum bisa memberi keputusan lantaran jumlah pakannya terbatas," jelasnya.

Hingga sekarang, Kopling telah memiliki 16 orang yang tergabung sebagai penggerak. Sejauh ini kendala yang dihadapi, kata Fauzi, justru kekurangan sampah organik. "Saat ini beroperasi 3 hari sekali. Kalau



Foto: foto.jurnalidk

saja sampahnya banyak kita bisa beroperasi setiap hari," tuturnya. Ia berfikir, untuk menambah jumlah sampah, bekerjasama dengan rumah sakit atau instansi yang berada di Kelurahan Sumber. "Kalau DLH (Dinas Lingkungan Hidup, red) siap memilah jenis sampah, kita siap menampung sampah organik yang ada di TPA," ujar Fauzi. Meski demikian mereka masih terkendala ketersediaan armada. Sehingga pemungutan sampah masih sebatas di

wilayah RT 05. "Kalau saja ada armadanya, kita ingin sampah rumah sakit kita yang olah. Disini ada dua rumah sakit, Sumber Hurip dan Paru yang saya kira sudah menggunakan pemilahan jenis sampah, tentu ini peluang buat kita menghasilkan produk pakan ikan lebih banyak lagi," jelas Fauzi. Selain itu, kendala yang dihadapi adalah jumlah ember masih terbatas, sehingga belum menjangkau RT lain. Di setiap rumah warga di RT 05 telah difasilitasi

dua ember yang disediakan oleh Kopling untuk memudahkan warga memilah sampah.

"Kita kekurangan ember untuk memfasilitasi rumah warga di luar RT kami, karena kalau tidak disediakan oleh kita, maka warga akan susah untuk memulai memilah sampah," ujar Jaelani.

Fauzi bersama Komunitas Kopling berencana ingin menambah jumlah kolam Ikan Lele hingga 15 terpal di akhir tahun ini. Namun pihaknya tetap menyadari bahwa pengelolaan ini masih dalam tahap pengembangan. Sehingga untuk sekarang akan fokus pada manajemen pengelolaan pakan ikan lele. Selain itu, sumber mata air yang terbatas juga masih kendala. Pasalnya kolam yang telah berdiri bersumber dari mata air warga di sekitar lahan pengolahan.

Sebelumnya, Kopling pernah mengelola sampah menjadi kompos pada tahap percobaan. Namun, pemanfaatan kompos tidak begitu maksimal. Lantaran para warga hanya menggunakan seperlunya saja.

Setelah beralih mengolahnya menjadi pakan ikan, wargapun sangat antusias. Dangi berharap, melalui Kopling pengelolaan sampah yang sudah dilakukan selain menciptakan lingkungan yang bersih, memberi kemanfaatan bagi dan menambah *income* warga, juga membantu pemerintah Kabupaten Cirebon dalam penanganan sampah dari hulu ke hilir.

"Sampah itu memang masalah darurat, tapi kalau kita mau untuk melakukan perubahan dengan mengolahnya dengan baik dari hal kecil, sampah itu sejatinya mandatkan keberkahan," pungkas Dangi, yang juga Sekretaris Camat Pasaleman itu. •suf

#	Unit	Nomor Telepon
1	Polresta Kab. Cirebon	0231-204466
2	Polres Cirebon Kota	0231-205179
3	Pemadam Kebakaran Kab. Cirebon	0231-638249
4	Pemadam Kebakaran Kota	0231-484113
5	Ambulance	0231-206330 ext.1042
6	Pos SAR Cirebon	0231-8356347
7	Unit Transfusi Darah PMI Kota	0231-204964
8	Unit Donor Darah PMI Kota	0231-201003
9	Pengaduan PLN Kota Cirebon	0231-236551
10	Pengaduan Gangguan PDAM	0231-244222
11	PDAM Tirtajati (Sumber)	0231-321457
12	PDAM Kota Cirebon	0231-204800
13	Pengaduan Gas Kota Cirebon	0231-203323
14	Terminal Bis Harjamukti	0231-248902
15	Stasiun Kejaksan	0231-210444
16	Stasiun Parujakan	0231-202577
17	RSUD Arjawinangun	0231-358335 / 359090
18	RSUD Gunung Jati	0231-206-330
19	RSUD Waled	0231-661126; IGD: 0231-661275
20	RSIA Sumber Kasih	0231-203815
21	RS Ciremai	0231-238335
22	RS Hasna Medika	0231-343405; IGD: 0231-8825010
23	RS Mitra Plumbon	0231-323100
24	RS Pelabuhan	0231-230024 / 205657
25	RS Permata	0231-8338877 / 8338899; IGD 0231-8338881
26	RS Pertamina Klayan	0231-224797 / 224798; IGD: 08112433338
27	RS Putra Bahagia	0231-485654
28	RS Sumber Urip	0231-8302689
29	RS Sumber Waras	0231-341079

Menuju Aplikasi e-perencanaan

Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon menggelar rapat kerja bersama Bappelitbangda Kabupaten Cirebon. Rapat kali ini membahas sistem proses perencanaan pembangunan daerah berbasis aplikasi e-perencanaan



Foto: foto dok setwan

Pembaharuan Perda Retribusi

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, Mad Saleh, memimpin rapat kerja bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon menilai bahwa retribusi pelayanan kesehatan yang ada saat ini sudah tidak sesuai dan selaras dengan kondisi aktual. Sehingga mengusulkan pembaharuan Perda tentang retribusi pelayanan kesehatan.



Foto: foto dok setwan

Pengadaan Tanah untuk TPAS

Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon melakukan rapat kerja bersama Dinas Lingkungan Hidup dan DPKPP di Kantor DPRD. Rapat kerja kali ini merupakan koordinasi berkaitan rencana DLH dalam pengadaan tanah di 5 titik untuk TPA sampah di Kabupaten Cirebon.



Foto-foto dok setwan

Pengawasan Pengelolaan Tenaga Kerja

Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon melakukan kunjungan kerja pengawasan ke PT HI-LEX Cirebon. Pada kunjungan kali ini anggota legislatif memastikan pengelolaan ketenagakerjaan di perusahaan tersebut berjalan dengan baik.



Foto-foto dok setwan

Kapan Sekolah Mulai Dibuka?



Foto: Alifan

Tanya :

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya seorang ibu rumah tangga. Sebagai orang tua, saya merasa keberatan dengan sistem pembelajaran online. Selain kebutuhan paket data semakin meningkat anak juga lebih banyak bermain daripada belajar. Bila KBM masih dilakukan secara online sebaiknya pemda memfasilitasi internet atau wifi gratis. Sekian terimakasih.

Wassalam

Ibu Ida , Cirebon

Tanya :

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepada Yth bapak-bapak pemimpin daerah dan pusat. Saya mewakili wali murid seluruh Indonesia yang insya Allah satu suara. Tolong dengan sangat buka kembali sekolah untuk anak-anak kami. Kami tidak semuanya paham dan mengerti cara belajar online. Kami tidak selalu punya uang untuk beli paket data.

Wassalam

Nimuli Abbas, Cirebon

Tanya :

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bapak/Ibu dewan yang saya hormati mohon sam-

paikan aspirasi kami ke Dinas Pendidikan. Kami berharap Dinas Pendidikan membuat terobosan dalam membuat KBM di tengah pandemi.

Belajar online ataupun sistem penugasan dengan belajar mandiri cukup merepotkan kami sebagai orang tua. Kami bukan pendidik dan sudah banyak pekerjaan rumah kami, sehingga tidak maksimal dalam mendampingi anak-anak kami. Apalagi anak saya tiga, cukup repot mendampingi mereka dengan jenjang pendidikan yang berbeda. Jadi tolong buatlah terobosan kebijakan. Terimakasih.

Wassalam

Irna, Plumbon.

Jawaban:

Ibu Ida, Pak Nimuli, dan Ibu Irna terimakasih atas aspirasi dan keluhannya yang disampaikan ke Cirebon Katon. Kami bersama pemerintah akan mencari jalan terbaik buat pendidikan putra-putri kita semua. Persoalan yang dialami Bapak/Ibu semua tentu persoalan kami juga.

Namun demikian, percayalah apapun yang diputuskan pemerintah tentu sudah dengan berbagai pertimbangan, dari berbagai aspek dan bidang. Untuk itu apapun yang sudah atau akan ditetapkan pemerintah sebaiknya dipatuhi demi kebaikan bersama.

Membuat Akta Kelahiran Online



Terima kasih, wassalamu'alaikum wr. Wb.
Basuni, beber.

Jawaban :

Wa'alaikumussalam Wr. Wb.

Terimakasih Pak Basuni sudah berkirim surat. Betul apa yang bapak sampaikan bahwa kartu keluarga dan akta Kelahiran merupakan kebutuhan mendasar masyarakat terkait administrasi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut Seperti pemerintah Kabupaten Cirebon, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (disdukcapil), telah memberlakukan pendaftaran online beberapa dokumen kependudukan. Adapun cara untuk dapat mencetak dokumen kependudukan sendiri, warga saat pendaftaran harus memberikan nomor telepon dan email. Informasi lebih lengkap dan pendaftaran akta online bisa di klik tautan berikut: https://aktaonline.cirebonkab.go.id/akta_online

Semoga jawaban ini bisa membantu, terima kasih.

Tanya

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Redaksi Majalah Cirebon Katon yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah memuat pertanyaan saya. Begini kang, kartu keluarga (KK) dan akta kelahiran merupakan kebutuhan mendasar masyarakat terkait administrasi, saya dengar KK dan akte kelahiran bisa diproses dan dicetak secara online. Bagaimanakah caranya?

Pengawasan BPNT di Kecamatan Weru

Tanya:

Bapak Ibu DPRD Kab. Cirebon yang saya hormati.

Sebelumnya saya ucapkan terimakasih kepada Redaksi Cirebon Katon, yang berkenan menerbitkan.

Saya Soim pedagang telur ayam warga Desa Karang Sari Kecamatan Weru. Masa paguebluk yang sudah hampir 6 bulan ini cukup memukul para pelaku UKM seperti saya. Pemerintah pun melalui Kemensos telah melakukan program pemulihan ekonomi.

Seperti diketahui, amanat undang-undang bahwa Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) itu dikelola oleh e-Warung dengan memberdayakan UMKM yang ada di Kecamatan, dan berkoordinasi dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

Saya berharap, bapak-ibu dewan bisa berkunjung ke Kecamatan kami. Karena saya pikir, e-warung yang ada di Kecamatan Weru, belum melalui mekanisme yang baik. Sehingga perlu adanya pengarahan dan pengawasan dari bapak-ibu dewan, agar penyelenggaraan BPNT sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Terlebih bisa memberdayakan para pelaku UKM seperti kami. Terimakasih.

Soim, Weru



Jawab:

Terimakasih Soim atas informasi yang disampaikan. Ini akan kami teruskan ke Komisi IV. Semoga bisa diwujudkan untuk kunjungan.

Kerajinan Gerabah Bertahan di Tengah Arus Zaman

Di tengah gempuran produk keramik, plastik, dan logam, Gerabah Blok Posong, Desa Arjawinangun, Kecamatan Arjawinangun, masih terus bertahan. Meski tidak segagah dulu.

"Celengan misalnya, sekarang udah banyak yang dari plastik dan kaleng. Dipilih masyarakat karena gampang menyimpannya, kalau jatuh tidak pecah," jelas Dewi (45), salah satu pengrajin.

Kondisi ini tak menyurutkan mereka. Tiap hari tetap saja memproduksi. Sudah menjadi rutinitas. "Kegiatan sehari-harinya begini, Mas. Jualnya memang susah, barang menumpuk di Gudang. Alhamdulillah untuk makan sih cukup," jelasnya.

Bantuan pemasaran dan bimbingan inovasi produk menjadi keharusan. Jika tidak, kerajinan yang sudah turun-temurun ini cepat atau lambat akan digilas arus zaman.

Foto: foto aihanck



Membenahi Ujung Tombak Pemerintahan

Permasalahan pemerintahan di tingkat desa sering terdengar. Mulai dari layanan administrasi, dana desa, hingga pemberdayaan ekonomi melalui Bumdes kerap bermasalah. Untuk itu, pembenahan pemerintahan harus dilakukan secara menyeluruh.



Rapat Pemdes Torjong Pembenahan Administrasi Desa

Pembenahan pemerintahan di tingkat desa sering kali luput dari perhatian. Padahal desa adalah ujung tombak pelayanan terhadap masyarakat. Jika pemerintah desa kurang cakap, maka pembenahan di tingkat Kabupaten menjadi kurang optimal. Untuk itu perlu pengawasan dan pembenahan secara menyeluruh.

“Komisi I memiliki tugas yang sangat vital yaitu pengawasan atas kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah, baik pemerintahan tingkat kabupaten hingga ke desa,” jelas Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Hasan Basori.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Abdul

Rohman, menguatkan pernyataan Basori. Prioritas pengawasan Komisi I salah satunya adalah pemerintah desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), dan Disdukcapil. “Kami ingin selesaikan masalah-masalah terkait dengan desa, terutama soal data,” ungkapnya.

“Komisi I itu adalah komisi tantangan, karena berkaitan dengan kebijakan, pengembangan SDM maupun yang bersifat rekomendasi, sedangkan kalau komisi lain itu aplikatif dari kebijakan itu. Oleh karenanya di Komisi I ada tiga hal yang menjadi skala prioritas kerja, pemerintah desa salah satunya,” ujar Basori menambahkan.



Foto: khalid/ka

Menurut Basori, isu pertama yang sedang diperjuangkan adalah pembenahan desa melalui kebijakan DPMD. Kabupaten Cirebon memiliki 412 Desa dan 12 Kelurahan dari 40 Kecamatan se-Kabupaten Cirebon. “80 persen masyarakat kita tinggal di desa, jika Kabupaten Cirebon ingin maju dan ingin lebih baik, maka tidak ada cara lain selain pengembangan desa” tegasnya.

Kemajuan di desa harus diawali dari administrasi dan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa untuk lebih optimal. Ada beberapa hal yang harus diperbaiki “Misalkan terkait kebijakan tahap pencairan dana desa (DD), peraturan pilwu, peran BPD yang tidak maksimal, dan belum adanya sinkronisasi administrasi dengan pemerintah di atasnya,” paparnya.

Hal itu yang harus diperbaiki, dengan mencari solusi kearifan lokal untuk menangani masalah ini. “Walaupun sudah diatur Perbup, Permendagri tetapi di lapangan selalu terjadi benturan,” jelasnya.

Kemudian, pembenahan pemerintahan desa berikutnya adalah terkait manajemen aset desa. Sistem aplikasinya belum tertata dengan baik. Begitu pun dengan pengelolaan pemanfaatan dan database aset yang dinilai belum maksimal.

Berikutnya adalah pembenahan pengelolaan Bumdes. Sebagai salah satu lembaga pemberdayaan ekonomi desa, dari 412 desa, baru 303 desa yang memiliki Bumdes. “Itupun masih jalan di tempat dan belum memberikan PAD yang signifikan untuk desa,” ungkapnya.

“Kita akan dorong kelompok-kelompok kerja, misalnya kelompok petani mangga, kelompok ikan air tawar, kelompok nelayan. Ini yang harus dikembangkan, karena menurut saya langkah kongkret mengurangi pengangguran, dan menambah pendapatan perkapita kabupaten Cirebon itu dengan mengembangkan ekonomi desa, dan ranahnya ada di DPMD,” jelas Basori.

Selain pembenahan desa komisi I juga berkonsentrasi pada penguatan Aparatur Sipil Negara (ASN). Konsep yang akan diterapkan adalah *married system*, untuk mengatur kebijakan soal pergantian, rotasi dan perpindahan pejabat. “Konsep *married system* ini akan kita maksimalkan, sehingga kita berharap tidak lagi terjadi jual beli jabatan maupun gratifikasi,” ujarnya.

Pembenahan ASN tentu tidak akan lepas dari pembenahan Inspektorat Daerah. Pasalnya, pengawasan intern secara independen dan objektif merupakan bagian dari sistem pengawasan agar terselenggaranya pemerintahan yang baik.

“Karena di tahun sebelumnya ada 4.900 kasus di desa, dan harus mengembalikan senilai 50 milyar, tetapi kita masih melihat belum ada independensi dan terlihat tebang pilih, kita akan perbaiki itu,” pungkasnya. •sul/fal



Pembenahan Memejemen Administrasi Desa Losari Kidul Kecamatan Losari

Foto: dok setwan

Pembangunan Pasar Pasalaran Tak Kunjung Usai

Sudah tiga tahun pembangunan pasar belum selesai, dan kini terhenti. Pedagang meminta agar pembangunan segera diselesaikan.



Komisi II Monitoring Pembangunan Pasar Pasalaran Kecamatan Plered

Para pedagang di pasar darurat Pasalaran mengeluh. Pasar sementara yang mereka tempati kini sudah tak layak lagi. Bocor dan sudah mulai rapuh. Mereka berharap pasar yang sedang dibangun segera selesai.

Sudah sekira tiga tahun pembangunan pasar berjalan. Namun hingga kini pembangunan belum selesai. Beberapa pedagang pun mengeluhkan hal itu ke DPRD Kabupaten Cirebon.

Atas laporan dari masyarakat itu, Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon pun melakukan pengecekan terhadap pembangunan pasar tradisional Pasalaran

yang berada di Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, itu. Komisi II ternyata malah menjumpai kondisi bangunan yang dinilai tidak layak.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon Mad Saleh mengatakan sejak tanggal 21 April 2017 sampai saat ini proses pembangunan belum selesai. "Ini menjadi pertanyaan besar bagi kami. Alasan dinas belum selesai pembangunan akibat covid-19," bebarnya.

Padahal, lanjut Mad Saleh, pembangunan pasar menghabiskan anggaran cukup besar. "Pada tahap pertama pembangunan pasar menghabiskan Rp 1,5



miliar dilanjut lelang tahap kedua sebesar Rp 8 miliar dan lelang ketiga sebesar Rp 10 miliar," ungkap Mad Soleh.

Saat melakukan monitoring di pasar tersebut, dirinya menyampaikan jika pedagang meminta pindah ke dalam pasar karena kondisi pasar darurat sangat tidak layak. "Pedagang sampaikan ke kami jika kondisi pasar darurat tidak layak," ungkapnya.

DPDR juga menyoroti soal kondisi bangunan dengan kondisi atap yang sudah bocor meskipun pasar belum bisa ditempati. Lalu kondisi tangga yang curam sehingga sangat membahayakan pengunjung pasar.

Anthony, Kabid Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian menjelaskan bahwa pembangunan Pasar Pasalaran dibagi dalam tiga tahap pembangunan. "Tahap pertama dari APBN Pemerintah Pusat Pada Tahun 2016. Kemudian dilanjutkan tahap II dari APBD Pada Tahun 2017. Dan Pada Tahun 2019 telah diajukan lagi untuk Tahap III ke Pemerintah Provinsi. Namun karena adanya pandemi Covid mengakibatkan anggaran di-*pending*," ungkapnya.

Pasar Pasalaran terdiri dari dua lantai dengan standar SNI, dengan jumlah pedagang kurang lebih seribu pedagang. Yang terdiri dari 300 lebih los dan 648 kios dengan luas 2,5m x 3m. Fasilitas yang ada juga adalah diantaranya enambelas (16) toilet, dua musholla, dan tempat parkir.

Menindaklanjuti hal tersebut, Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon merekomendasikan pembangunan Pasar Pasalaran untuk segera diselesaikan. "Harus ada penambahan ruang ventilasi udara, pembenahan tangga yang curam, dan berbagai fasilitas untuk kenyamanan masyarakat," kata Mad Soleh.

Tertundanya pembangunan pasar dikhawatir-



kan justru akan membuat kondisi fisik yang sudah terbangun malah rusak. Kondisi ini tentu akan merugikan anggaran yang sudah dibelanjakan. Apalagi jika membuat kualitas bangunan secara menyeluruh menjadi menurun. Tentu akan membahayakan pengguna.

Untuk itu tidak ada jalan lain pembangunan harus segera diselesaikan. Pertama untuk menjaga kualitas bangunan dan menghindari penyusutan. Kedua, kondisi pasar darurat sudah tidak layak. Mad Saleh meminta agar bupati bisa arif menyikapi hal ini.

"Bupati harus berpihak kepada pedagang, agar lebih nyaman dalam mencari nafkah," tandasnya. Mad Saleh juga meminta agar para pedagang tetap menjaga kondusifitas, agar pembangunan bisa dilanjutkan dengan lancar.

"Sebenarnya kami sudah ingin pindah menempati pasar baru, namun melihat kondisinya seperti itu ya mau gimana lagi, kami pasrah. Kami berharap Bapak-Ibu anggota dewan bisa memperjuangkan nasib kami. Semoga pasar baru bisa cepat selesai," ungkap Wardo, salah satu pedagang. •fal

Bersolek Sambut Wisatawan

Cirebon memiliki banyak destinasi unik. Sayangnya belum didukung lingkungan yang nyaman. Sampah, banjir, dan jalan rusak sering menjadi keluhan wisatawan. Kini saatnya berbenah.



Pengangkutan Sampah di Pasar Desa Losari Kidul Kecamatan Losari

Selama pandemi covid-19 tempat wisata ditutup. Beberapa sudah mulai dibuka dengan pembatasan. Di masa inilah idealnya para pemangku kepentingan bersolek diri mempercantik destinasi dan kawasan agar menarik bagi wisatawan.

Cirebon banyak memiliki destinasi wisata yang unik, baik wisata alam, religi, kuliner, hingga budaya. Ini adalah modal besar. Namun itu semua

tidak akan membuat wisatawan betah dan kembali lagi jika tidak didukung lingkungan yang nyaman.

Banyak wisatawan yang mengeluhkan bahwa Kabupaten Cirebon kumuh, sampah berserakan dimana-mana dan ruas jalan rusak. Belum lagi jika musim penghujan tiba, beberapa titik tergenang banjir. Tentu saja kondisi ini menambah ketidaknyamanan.

Kondisi itu pulalah yang disadari oleh Komisi

III DPRD Kabupaten Cirebon. Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Dr. Hj. Hanifah, MM, menjelaskan bahwa Komisi III memperjuangkan program yang sudah digagas oleh bupati dan gubernur. Fokus pengawasan pada tahun 2020 adalah pariwisata, penanganan sampah, dan banjir.

“Sejalan dengan program provinsi yang mengusung kawasan pariwisata dengan tema Juara Lahir Batin. Kawasan Kabupaten Cirebon bak wilayah Segitiga Emas Rebana memiliki banyak sekali potensi pariwisata yang bisa dikembangkan,” ungkap doktor ilmu manajemen ini saat ditemui di ruang F-PKB.

Sejalan dengan itu, Hermanto, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, melakukan upaya secara maksimal dalam hal pengawasan pengelolaan sampah dari tingkat desa hingga ke TPA. “Untuk mendorong sektor pariwisata tentunya Cirebon harus bersih dan bebas sampah,” tegasnya.

Menurut Hanifah, kawasan Pariwisata yang baik adalah yang bebas dari sampah, infrastrukturnya baik, bebas jalan berlubang, bebas banjir, dan bebas pencemaran lingkungan. “Bagaimana mungkin pariwisata kita akan laku dan diminati, jika akses jalannya rusak dan sampahnya dimana-mana,” lanjutnya.

Hanifah juga menyinggung soal pajak restoran, hotel, tempat hiburan dan tempat kuliner yang macet, akibat pengunjungnya berkurang. “Kalau kita bisa memaksimalkan tempat wisata, kuliner dan tempat hiburan, tentu pajaknya juga tidak macet dan akan berdampak pada PAD yang signifikan, hal ini saling berkaitan,” ucapnya.

Sejauh ini, Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon sedang fokus mendorong percepatan penanganan rawan banjir di beberapa titik. Di awal tahun 2020 banjir melanda sedikitnya empat kecamatan di Kabupaten Cirebon karena luapan sungai yang disebabkan curah hujan yang tinggi.

Upaya penanganan yang didorong Komisi III adalah dengan pengerukan sungai ulang dan peningkatan sistem drainase. “Banjir yang sering terjadi di kabupaten Cirebon dikarenakan luapan sungai karena sampah, maka tidak ada cara lain selain revitalisasi sungai dengan mengeruk sampah dan sedimen,” kata Hanifah.

Selain itu, pentingnya drainase jalan harus mendapat perhatian khusus. Dengan tidak adanya saluran drainase ataupun kurang berfungsinya saluran drainase secara maksimal, maka dapat menimbulkan berbagai masalah bagi semua pengguna jalan. Hal ini dapat dirasakan ketika hujan turun

atau sudah masuk ke musim penghujan, tandasnya.

Sejauh ini, kata Hanifah, Komisi III sudah berkunjung ke beberapa titik yang memang jalannya rawan banjir dan rusak. Diantaranya, Jalan Pabuaran-Sindang, kondisinya sudah rusak parah. Penyebabnya, saluran drainase tidak berfungsi.

“Kami berkunjung langsung dan ternyata memang saluran drainasenya tidak berfungsi normal, selain itu konstruksi jalan yang tipis juga menjadi sebab cepat rusak, apalagi jalan ini sering dilalui bus, truk dan kendaraan lainnya,” tandasnya.

Komisi III DPRD Kab. Cirebon, akan mendorong secara intens terhadap dinas terkait, dalam hal ini PUPR agar bisa ditindak lanjuti secepatnya. “Kami ingin di tahun ini hal-hal berkaitan sampah, banjir dan drainase untuk bisa diatasi secepatnya, agar potensi wisata yang ada bisa dimaksimalkan,” pungkasnya. •suf/fal



DPRD Minta Peserta Didik Wilayah Perbatasan Diperhatikan

Kesempatan anak untuk bersekolah harus menjadi perhatian utama. Jangan sampai sistem penerimaan justru mengakibatkan siswa tidak bisa diterima di sekolah mana pun.



Foto: foto dok setawan

Monitoring Komis IV pelaksanaan PPDB di SMPN 2 Palimanan

Setelah adanya peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), sistem yang digunakan tidak jauh beda dengan tahun sebelumnya. Pendaftaran dilakukan secara online dan berdasarkan zonasi. Perbedaannya, hanya pada kuota. Dimana tahun ini kuota tidak lagi 90 persen, tetapi 50 persen.

Demikian disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, H Rasida Edi Priyatna, saat

monitoring di SMPN 2 Palimanan. Muncul kekhawatiran, masyarakat menjadi resah dengan perubahan aturan kuota tersebut, khususnya mereka yang bertempat tinggal di daerah perbatasan, jauh dari sekolah. Misalnya masyarakat (pelajar) yang berada di daerah Pagergunung, Desa Cipanas, Perbatasan Kabupaten Cirebon, Majalengka dan Kuningan.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD, H Rasida Edi Priyatna. Menurutnya, sebelum draf



aturan disahkan bupati, berbagai kemungkinan harus bisa dipertimbangkan seperti langkah dengan solusi yang akan dilakukan. "Yang kami khawatirkan, justru ketika zonasi diberlakukan, bagaimana dengan mereka yang rumahnya berada di perbatasan. Bagaimana nasib mereka," tutur Politisi Partai Golkar ini.

Karena dengan adanya pengurangan kuota zo-

nasi, pendaftaran tidak lagi seleluasa tahun sebelumnya. "Jangan sampai calon peserta didik itu, ke satu sekolah di Kabupaten Cirebon ngga masuk ke sekolah di Kabupaten Majalengka juga ngga masuk. Atau daerah-daerah lain yang berbatasan dengan kita," imbuhnya.

Makanya, kata dia, perlu segera difikirkan solusinya. Jangan sampai masyarakat yang dikorbankan dengan hadirnya aturan tersebut. Menjadi hak anak mendapatkan pendidikan yang layak. Sekaligus menjadi tanggungjawab negara dalam mencerdaskan anak bangsa. "Jangan sampai tidak diterima dan menimbulkan anak ngga sekolah di mana-mana, karena alasan zonasi," imbuhnya.

Rasida mengingatkan, jalur lainnya pun harus dimanfaatkan masyarakat. Karena selain zonasi, juga ada jalur lain. Yakni jalur prestasi yang kuotanya 30 persen, afirmasi 15 persen dan perpindahan 5 persen. Pilihan itu, bisa menjadi jawaban, agar tidak terfokus pada jalur zonasi.

Selain itu, mendapatkan pendidikan di sekolah sebetulnya, bisa dimana saja. Tidak mesti harus di sekolah negeri. Sekolah swasta menjadi pilihannya.

"Sekolah dimana saja. Tidak diterima di negeri, ya ke swasta. Toh di swasta sekarang juga sudah gratis," tuturnya.

Kesempatan itu, kata dia mesti dimanfaatkan pihak swasta untuk meningkatkan kualitas. Jangan sampai asal-asalan. Sehingga masyarakat tidak kecewa dan tidak ketergantungan dengan sekolah negeri "Swasta harus meningkatkan kualitas pembelajarannya. Jangan sampai swasta asal-asalan," imbuhnya. Disamping itu, pemerintah pun juga harus fleksibel menegakkan aturan di musim pandemi Corona seperti saat ini.

Seperti diketahui, Permendikbud Nomor 44 tahun 2019 tentang PPDB masih diberlakukan untuk pelaksanaan PPDB tahun 2020 ini. Hanya saja, ada perbedaan antara pelaksanaan PPDB 2019 dengan PPDB 2020. Perbedaannya terletak pada persentase pembagiannya. Yakni, 50 persen untuk zonasi, 30 persen untuk prestasi, 15 persen afirmasi, dan perpindahan 5 persen

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, H Asdullah S Anwar menjelaskan Permendikbud Nomor 44 tahun 2019 tentang PPDB masih diberlakukan untuk pelaksanaan PPDB tahun 2020 ini. Hanya saja, ada perbedaan antara pelaksanaan PPDB 2019 dengan 2020. Letaknya pada persentase pembagiannya. "50 persen untuk zonasi, 30 persen untuk prestasi, afirmasi 15 persen dan perpindahan 5 persen," pungkasnya. •fal

Muhamad Teguh Rusiana Merdeka

Keyakinan Diri Sebagai Kunci Sukses

Meski dinilai sukses berpolitik di usia muda, Teguh merasa dirinya belum menjadi apa-apa. Baginya kesuksesan bukanlah menduduki jabatan publik.



Foto: foto dok teguh

Laki-laki kecil itu termenung. Ia menyaksikan teman-teman seusianya asyik berenang saat nadran. Kemampuan lumrah anak-anak yang berdomisili sekitar pantai. Ingin ia bergabung dengan mereka berbasah ria. Namun, ada ragu.

“Hemm gimana ya caranya berenang di air laut ini,” gumamnya dalam hati. Anak Kades Kudukeras, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, memperhatikan rekan-rekannya sambil berpikir.

Kurdi, sang ayah yang memahami kesulitannya, pun memberikan nasihat. “Berenang itu, pikiranmu harus yakin kalau kamu bisa, buat badanmu rileks, nyaman dan jangan kaku,” ujarnya.

Ucapan sang ayah itulah yang hingga kini masih terngiang di telinga Muhamad Teguh Rusiana Merdeka. Dua hal itulah—berusaha dengan yakin, dan lakukan dengan ketenangan—yang menjadi resep rahasia sukses Teguh. Termasuk yang menghantarkannya menjadi seorang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.

Pendidikan formalnya dimulai dari TK Kepudang. Kemudian melanjutkan ke SDN Tersana Baru Babakan, dan SMPN 1 Babakan. Hari-harinya biasa saja, seperti anak remaja pada umumnya. “Ayah menginginkan saya menjadi seorang penegak hukum,” jelasnya.

Dengan alasan itulah ia memilih melanjutkan ke SMAN 2 Kota Cirebon. “Harapannya tentu saja dengan bersekolah di SMA favorit bisa dengan mudah meneruskan ke jenjang berikutnya,” ucapnya.

Pasca lulus dari SMA Teguh langsung mendaftarkan diri ke Akademi Kepolisian (Ak-



pol), sayangnya teguh harus menelan pil pahit. Cita-citanya menjadi seorang penegak hukum seolah kandas, setelah melihat hasil tesnya: tidak diterima.

Tahun 2004, ia memilih melancong ke Jakarta, mengadu nasib bekerja. Setelah dua tahun bekerja, ia kembali teringat keinginan ayahnya agar ia menjadi seorang penegak hukum. Karena itulah ia memilih melanjutkan pendidikannya.

Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, tempat yang ia pilih untuk menimba ilmu. “Kalau saya tidak bisa menjadi penegak hukum secara langsung, minimal dengan menjadi sarjana hukum saya punya akses ke mereka,” ujar Teguh membeberkan alasannya memilih fakultas hukum.

Jauh dari orang tua membuat Teguh berpikir agar lebih prihatin dan segera mandiri menggapai cita-cita. Beruntung di Jakarta ada seseorang yang menjadikan dirinya anak angkat. Ayah angkat inilah yang banyak membantu dirinya, dan mengarahkannya

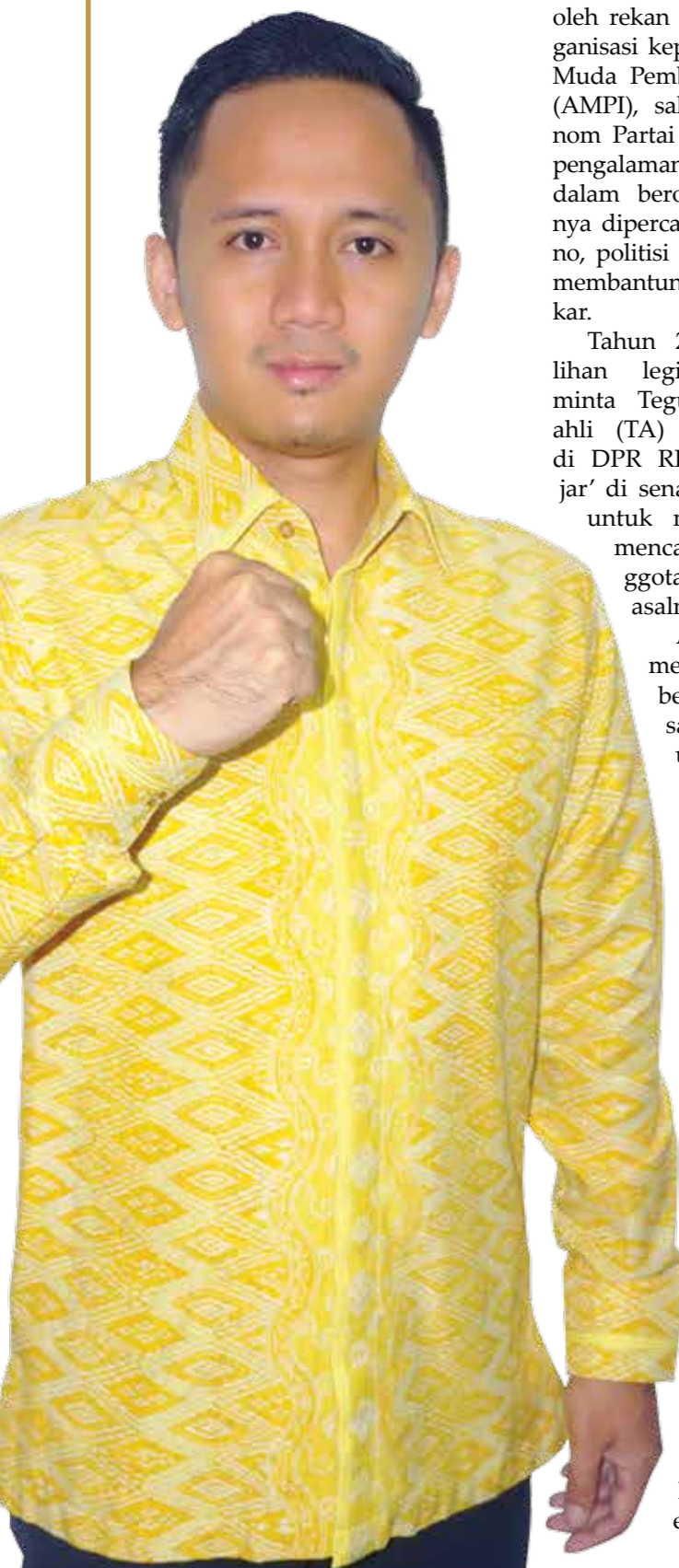
untuk terus semangat.

“Kalau kamu memang mau jadi polisi, tentara, jaksa, hakim atau advokat ya harus dimulai, jangan pernah bermimpi kalau tidak pernah memulainya dengan *step by step*,” ujar sang ayah angkat yang membuat teguh semakin yakin akan pilihannya.

Saat kuliah, Teguh aktif di organisasi internal kampus yang berbasis keilmuan. Inilah yang membuka jaringan dengan senior-seniornya. Lulus 2010, Teguh bermodal jejaring memulai merintis Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH).

Kasus pertama yang ia tangani adalah kisruh penggusuran Pasar Cinere. Ia bersama kawan-kawannya membela hak para pedagang saat penggusuran. Tak hanya itu, ia kemudian bersama rekan-rekannya mendirikan kantor advokat, “Kesibukan saya terpecah, saya pun tidak aktif lagi di LKBH karena fokus pekerjaan,” kata Pria yang tinggal di Desa Kudukeras itu.

Setelah itu, Teguh direkrut



oleh rekan seniornya masuk organisasi kepemudaan: Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), salah satu badan otonom Partai Golkar. Kepiawaian, pengalaman, serta inovasinya dalam berorganisasi membuatnya dipercaya oleh Dave Laksono, politisi Fraksi Golkar, untuk membantunya di DPP Partai Golkar.

Tahun 2014, setelah pemilihan legislatif, Dave meminta Teguh menjadi tenaga ahli (TA) dan membantunya di DPR RI. Dua tahun 'belajar' di senayan, Teguh diminta untuk mempersiapkan diri mencalonkan sebagai anggota legislatif di daerah asalnya, Cirebon.

Awalnya, ia enggan menjawab bahkan beberapa kali menolak saat dirinya diminta untuk maju menjadi Caleg DPRD di Dapil V Kabupaten Cirebon. Barulah pada 2019, menjelang pemilu, Teguh mengatakan kesiapannya.

Meski begitu keraguan sempat menghampirinya. "Awalnya saya pesimis bisa meraih suara di Dapil V karena memang bukan basis, tapi alhamdulillah baru pertama kali mencalonkan bisa terpilih," katanya.

Teguh tidak pernah terpikir kelak dirinya akan menjadi seorang pejabat publik dalam posisi yang strategis. Saat ia terpilih,

ia hanya berpikir sampai dilantik saja. Ternyata Tuhan punya cara lain dalam mengatur jalan hidup seseorang. Ia diamanati menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon periode 2019-2024.

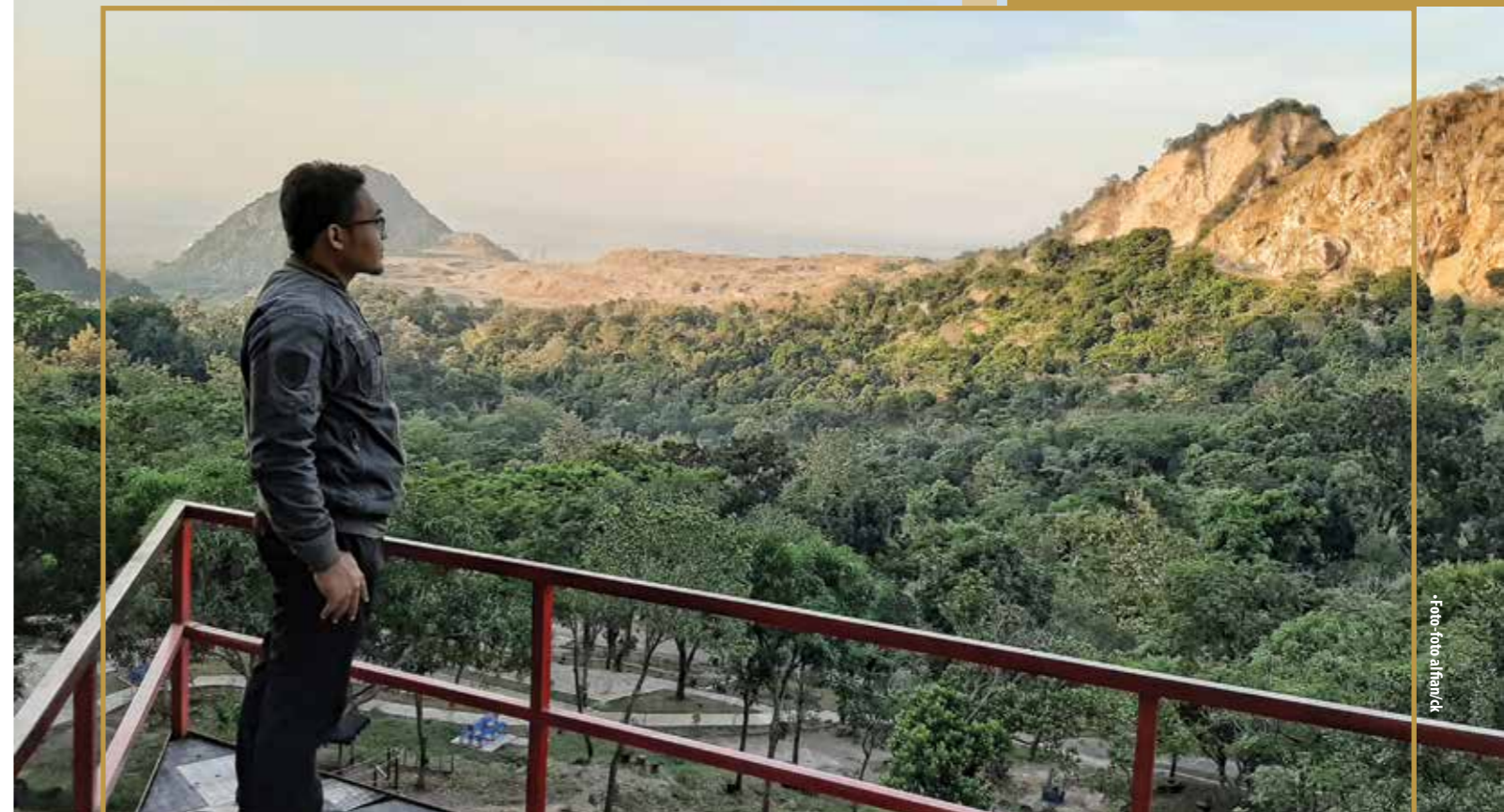
Kesuksesan Teguh ini bisa jadi buah dari nasihat bapaknya. "Jika kamu menginginkan sesuatu, maka lakukanlah usaha dan doa, kalau keduanya sudah dilakukan tetapi masih saja salah, berarti ada yang salah pada dirimu," ucapnya menegenang nasihat orang tuanya.

Pun demikian, di usianya yang ke 34, Teguh masih merasa bahwa dirinya belum sukses. Kesuksesan baginya adalah saat masyarakat Cirebon terbebas dari kemiskinan, pengangguran dan tercapainya kesejahteraan yang merata. "Kalau masyarakat sudah sejahtera, angka kemiskinan, pengangguran turun baru itu sukses," tegasnya.

Kemungkinan untuk mencalonkan diri kembali di periode selanjutnya pun juga belum terpikirkan olehnya. "Belum tentu, saya harus buktikan dulu," paparnya. Baginya fokus pekerjaannya saat ini adalah membuktikan terlebih dahulu bahwa ia layak dan bisa dipercaya oleh masyarakat kabupaten Cirebon.

Langkah Teguh tidak terlepas dari motto hidupnya "Lakukan yang terbaik apa yang ada di dalam hati kecil". Ia hanya melakukan sesuatu dari lubuk hati yang menurutnya baik.

Setelah sukses 'berenang-renang' di politik. Bagaimana dengan berenang di lautan? "Saya buktikan perkataan ayah, saat berada di Sulawesi, saya mencoba berenang di lautan dengan bermodalkan keyakinan, dan ternyata bisa berenang dengan gaya bebas tanpa takut tenggelam," paparnya. •suf



Wisata Batu Lawang Cupang

Ikon Baru Cirebon Nan Menjulang

Wanawisata ini unik. Selain pemandangan yang menakjubkan, pengunjung akan menyaksikan batu-batu menjulang nan indah. Sungguh inovasi karang taruna yang patut ditiru.

Jalan berkelok, medan naik turun, menjadi sensasi tersendiri menuju objek wisata ini. Deretan bukit, tebing batu, dan hamparan alam hijau berpadu memanjakan mata. Pilihan yang pas untuk sesaat melepas kepenatan.

Desa Cupang sebetulnya sudah tidak asing bagi masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Pasalnya terdapat situs sejarah berupa petilasan Sunan Bonang. Dahulu petilasan tersebut sangat ramai dikunjungi oleh peziarah. Namun beberapa tahun kebelakang jarang peziarah yang datang.

Padahal, kedatangan peziarah ke situs Sunan Bonang membawa berkah bagi masyarakat sekitar secara ekonomi. "Jadi dulu tuh disini ramai peziarah yang berkunjung ke situs Sunan Bonang. Tapi beberapa tahun terakhir berkurang. Sementara disini juga masih banyak warga terutama pemuda yang masih dirumah dan belum bekerja," Jelas Aris Pengurus Karang Taruna, yang juga pengelola wisata Batu Lawang.

"Melihat persoalan tersebut kita dari karang taruna berembung untuk memanfaatkan po-

tensi tebing batu dan alam yang sekarang menjadi wisata Batu Lawang. Dengan berkurangnya peziarah, Kita berharap ada wisatawan datang ke Batu Lawang. Sehingga masyarakat tetap bisa mendapat manfaat. Istilahnya kita buka lembaran baru," lanjutnya.

Semangat karang taruna memajukan desa melalui pariwisata disambut baik oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat Desa Cupang pada umumnya mendukung penuh. Secara sukarela dan swadaya



mereka kerja bakti membuka lahan dan mengumpulkan uang sebagai pendanaan awal pembuatan wisata Batu Lawang.

Meskipun lahan berada di Desa Cupang, namun dalam kepemilikan Perhutani Majalengka, dan pengelolaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Ciwaringin. Untuk itulah mereka berkoordinasi, berkomitmen untuk sama-sama menjaga hutan dan melestarikannya. Komitmen inilah yang menjadi acuan karang taruna dalam mengelola potensi wisata yang ada.

Tahun 2016 menjadi awal mula perencanaan dan pembukaan lahan pariwisata. Kemudian awal tahun 2017 mulai dibuka untuk umum. Dengan konsep wanawisata dan aktivitas pecinta alam, wisatawan mulai berdatangan. "Modal awal dari swadaya masyarakat dan sumbangan beberapa perusahaan terkumpul sekitar Rp 100 juta," jelas Mulyono, Ketua Pengelola Wisata Batu Lawang.

"Promosi dan sosialisasi kita lakukan melalui sosial media. Kita punya Instagram @batulawangcirebon_official. Kita juga memiliki berbagai event yang diselenggarakan. Seperti Festival Gunung Kromong dan Grage Rock. Khusus untuk Festival Gunung Kromong ini menjadi agenda tahunan yang sudah kita laksanakan dua kali, tahun 2018 dan 2019," lanjutnya.

Promosi dan event yang dilakukan membuat wisata batu lawang kian dikenal. Tidak sedikit wisatawan datang dari luar kota. Bahkan wisata ini pernah dikunjungi oleh artis ibu kota. Para pejabat seperti Bupati dan dinas-dinas pun sudah pernah berkunjung. "Kita pernah kedatangan artis, seperti Thomas

Djorghy, Al Fathir Muchtar, Michella Adlen," jelas Aris.

Saat ini Batu Lawang menjadi wanawisata pilihan, terbukti dengan banyaknya jumlah wisatawan yang datang. "Rata-rata perhari 50 sampai 100 pengunjung, saat *weekend* bisa mencapai 700 orang. Kita sering juga dijadikan tempat acara keluarga atau instansi tertentu. Setiap minggu pagi selalu ada kelompok senam ibu-ibu yang rutin datang dari beberapa daerah," jelasnya.

Berbagai fasilitas dan spot selfi instagramable disiapkan oleh pengelola batu lawang. Selain itu mereka juga menyediakan berbagai wahana seperti *flying fox*, *fun climbing*, ATV, dan camping. Hal itu menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan "Kita ini pariwisata yang murah. Tiketnya hanya Rp 7.000, ditambah parkir motor Rp 3.000 atau mobil Rp 5.000," jelas Mulyono.

Batu Lawang juga memiliki suasana hutan yang cocok untuk camping. Para pecinta alam kerap berkegiatan di sini. Mereka datang dari berbagai daerah. Selain berkemah mereka biasanya juga berlatih memanjat tebing, *fun climbing*. "Tempatnya bagus, indah dan murah. Asik buat camping dan juga banyak tempat yang instagramable," Ungkap Nina salah satu pengunjung yang ditemui.

Berpendapatan hingga Rp 8 juta per bulan, pengelola mampu menyumbang PAD sebesar 12 juta per tahun. "Pemasukan kita rata-rata Rp 8 juta perbulan dan sumbangsih ke PAD sebesar Rp 1 juta perbulan," jelas Mulyono.

Agar wisata ini semakin dikenal dan menjadi pilihan, pengelola memiliki rencana pengembangan jangka panjang. Salah satu upaya dasarnya adalah menyiapkan infrastruktur jalan.

"Kita ingin bus besar bisa masuk. Maka kita ajukan agar ada jalan yang dapat diakses oleh kendaraan besar. Alhamdulillah sudah ada dukungan dari Dinas Pariwisata," jelasnya.

Kedepan wanawisata batu lawang akan merambah ke wisata air seperti kolam renang. Juga dibuat track ATV yang lebih panjang dan menantang. Memanfaatkan teknologi yang ada, akan disiapkan pemesanan tiket secara online. Wanawisata ini juga akan menawarkan paket *home stay* di rumah warga. Memanfaatkan rumah-rumah warga agar bernilai ekonomi.

"Sebagai pengembangan

kedepan agar bisa *go internasional*, maka kita menyiapkan segalanya. Kita melakukan penghijauan agar debit air terjaga. Kita juga mengusulkan kepada dinas terkait membuat embung. Kita berharap penataan dan fasilitas semakin lengkap sehingga Batu Lawang ini menjadi ikon wisata di Cirebon," Jelas Aris.

Segala upaya dilakukan agar perencanaan dapat diwujudkan. "Kita memiliki tekad agar wisata ini dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Dengan menjadikan wisata Batu Lawang sebagai ikon. Kalau belum ke Batu Lawang, berarti belum ke Cirebon," Pungkasnya. •Mol



Wanawisata Kedondong Kidul

Masih Perawan, Butuh Investor

Potensi wanawisata Desa Kedondong Kidul cukup kaya dan unik. Ada hamparan alam yang indah, curug ciranca, pemandian air hangat, dan bumi perkemahan. Cukup menarik dan menggoda. Siapa mau?



Bumi Perkemahan Kecamatan Dukupuntang

Perawan. Mungkin itulah satu kata yang mewakili potensi wanawisata Desa Kedondong Kidul. Desa di Kecamatan Dukupuntang ini kaya potensi wisata, namun belum terkelola. Menyadari hal itu, pemerintah desa kini membuka tangan. Siap menerima investasi.

Keindahan alam, deretan pegunungan, curug, dan air hangat bisa disulap menjadi wanawisata yang mengasyikkan. "Kita

memiliki alam yang indah, deretan pegunungan, bumi perkemahan, Curug Ciranca, dan air hangat," jelas Toto, Kaur Ekbang Desa Kedondong.

Sementara ini wisata di kawasan Curug Ciranca berjalan suka-suka. Pengunjung yang datang tidak dikenakan retribusi. Mereka hanya cukup membayar jasa penitipan motor yang dikelola secara mandiri oleh warga sekitar. "Belum ada retri-

busi, pengunjung datang dan hanya membayar jasa penitipan motor. Sebab lokasi curug tidak bisa dijangkau dengan kendaraan," lanjutnya.

Desa Kedondong Kidul juga memiliki bumi perkemahan (Buper). Potensi Buper sangat bisa dioptimalkan, sebab beberapa tahun sebelumnya cukup sering digunakan untuk kegiatan pramuka. "Sebenarnya kita ada bumi perkemahan dan sempat

ramai digunakan oleh beberapa sekolah untuk kegiatan pramuka. Bahkan ada yang datang dari luar daerah," terangnya.

Selain Curug Ciranca dan Buper, potensi pemandian air hangat juga tidak kalah menarik. Sudah banyak pula yang mencoba kehangatan airnya. "Kita juga ada sumber air hangat, yang airnya tidak terpengaruh musim. Airnya selalu ada. Pengunjung yang datang biasanya dengan tujuan pengobatan, karena banyak mengandung belerang," jelasnya.

Melihat segala potensi yang ada, maka perlu ada sentuhan serius dari semua stakeholder. Potensi pariwisata bisa menunjang pendapatan dan perekonomian masyarakat. "Kedondong Kidul ini memiliki potensi Buper dan wanawisata. Kita berharap ada pihak ketiga untuk turut mengembangkan karena potensi ini bisa menunjang PAD dan mensejahterakan masyarakat," ungkap Camat Dukupuntang Didin W Ridwan.

Senada dengan camat, Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Mad Saleh menilai potensi wisata bisa menaikkan PAD dan menggeliatkan ekonomi masyarakat. "Meningkatkan PAD bisa dengan melihat segala potensi, misalnya pariwisata yang ada di Desa Kedondong kidul ini. Ajukan saja ke Disbudparpora. Ini bisa untuk wanawisata dan menggeliatkan perekonomian," jelasnya.

Keterbatasan pendanaan menjadi kendala dalam memaksimalkan potensi wisata yang ada. Dana Desa belum mampu untuk mengakses potensi tersebut, sebab masih banyak sektor lain yang butuh diprioritaskan. "Dana Desa kita terbagi-bagi dan belum cukup untuk sampai ke pengembangan pariwisata,"



Curug Ciranca Kec. Dukupuntang

ungkap Toto.

Meski demikian, semangat untuk mewujudkan wanawisata di Desa Kedondong Kidul terus menggelora. Beberapa upaya dilakukan, misal dengan mengalokasikan dana Bantuan Provinsi (Banprov) untuk memperbaiki akses jalan menuju lokasi wisata. "Tahun ini Banprov akan dialokasikan untuk menata jalan ke arah wisata," lanjutnya.

Pemdes juga merangkul pengusaha lokal agar bersama-sama membangun sektor pariwisata. Pemdes memberi kesempatan kepada para pengusaha untuk berinvestasi. "Kita juga menggandeng para pengusaha disini agar bisa ikut mengembangkannya. Alhamdulillah sudah ada yang mulai membantu menata

parkiran dan beberapa saung dilokasi wisata," jelasnya.

Selain itu, Pemdes juga berharap kepada Disbudparpora Kabupaten Cirebon. Mereka meminta Disbudparpora agar memperhatikan potensi wisata yang ada di Desa Kedondong Kidul ini belum banyak dikembangkan di Kabupaten Cirebon. Wisatawan cenderung datang ke kabupaten tetangga saat mencari wanawisata.

"Kita berharap kepada Disbudparpora Kabupaten Cirebon agar ikut memaksimalkan potensi pariwisata yang ada di Desa Kedondong Kidul. Sebab kami yakin potensi alam yang ada tidak kalah indah dengan kabupaten sebelah," tandasnya. •Mol

Mohamad Luthfi



Tempat Sampah

“Kang punten ya, disini itu bukan tempat sampah. Ini adalah tempat kerja...”

Ini adalah kali kedua saya berkunjung ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Gunung Santri, Kepuh, Palimanan. Siang itu saya terhenyak. Ada yang tak biasa. Tapi, saya bersyukur. Senang. Dapat pelajaran berharga.

Saya menghampiri empat orang yang sedang memilah sampah. Sepertinya pemulung. Mereka sigap memainkan besi panjang yang ujungnya melengkung runcing bak mata pancing, mengambil dan memisahkan sampah plastik.

Mulanya saya ingin berbincang seputar pemilahan sampah. Namun, belum selesai saya bicara, salah satu dari mereka nyeletuk. “Kang punten ya, disini itu bukan tempat sampah. Ini adalah tempat kerja,” ujarnya.

Saya terpaku beberapa saat. Sebuah sudut pandang yang tak pernah saya pikirkan sebelumnya. Semua orang juga tahu, dan sudah menjadi pengetahuan umum, kalau TPAS itu ya tempat sampah.

“Memang ini tumpukan sampah Kang, tapi ini tempat kerja buat kami. Jadi kami ini juga bukan sampah Kang, kami kerja,” sambungnya lagi. Saya pun mendengarkan mereka dengan seksama. Saya rekam betul.

Sudut pandang para pemulung ini menarik. Berbeda. Cukup mengusik. Bisa jadi mereka inilah pejuang lingkungan yang sebenarnya. Pahlawan keluarga yang sesungguhnya. Pekerja sejati.

Mereka inilah manusia bersih, meski bekerja di tempat sampah. Dari proses pekerjaan yang saya lihat, insyaallah penghasilan mereka halal. Bahkan punya nilai ibadah lebih. Bukan sekadar memberi nafkah keluarga, tapi juga menyelamatkan lingkungan dari plastik, atau bahan lain yang tidak mudah terurai.

Saya menangkap sebuah ironi. Tempat sampah, bagi mereka, adalah tempat kerja. Karena itulah mereka sungguh-sungguh bekerja. Sementara, di tempat lain, yang bersih, nyaman, bahkan ber-AC, justru tidak sungguh-sungguh bekerja.

Tempat bergengsi, yang mereka sebut kantor itu,

justru menjadi tempat santai, bermalas-malasan. Banyak kasus, terutama di instansi pemerintahan, yang makan gaji buta, atau mungkin setengah buta.

Berangkat pagi, isi presensi, *finger print* atau apalah namanya. Canggih alatnya. Setelah itu, mereka keluar kantor. Tugas katanya. Padahal Cuma jalan-jalan di mall. Yang bernasib apes, ketangkap satpol PP. Terjaring operasi disiplin.

Bahkan, di tempat lain, ada yang berkarpet tebal, super nyaman lah pokoknya, justru menjadi tempat praktik-praktik kotor. Pungli, patgulipat, hingga praktik praktik merugikan uang negara. Miliaran, bahkan triliunan.

Lantas, pertanyaannya: mana yang tempat sampah, dan mana tempat kerja? Siapa yang (maaf) manusia sampah, dan siapa pekerja sejati?

Secara fisik bisa jadi nyaman, ber AC, dengan perkakas super mahal dan canggih, kalau berisi manusia-manusia senantiasa melanggar hukum dan norma, masihkah layak disebut kantor? Jika tempat itu diisi (maaf) manusia sampah, masihkah tepat disebut kantor? Apa justru lebih pas disebut tempat sampah saja?

Entahlah. Silakan renungkan saja. Pasti banyak yang menyangkal. Alasannya: “Tidak bisa begitu, tidak bisa digeneralisasi. Tergantung orangnya, dst.” Jadi menurut saya pertanyaan itu tak perlu dijawab, cukup direnungkan saja. Introspeksi diri.

Saya cuma ingin menegaskan bahwa para pemulung di TPAS itulah pekerja sejati. Secara kasat mata berada di tempat sampah, tapi mereka benar-benar bekerja di tempat kerja. Sekilas secara fisik kotor, tapi sejatinya mereka manusia bersih. Jauh dari korupsi.

Terakhir marilah kita bertanya pada diri sendiri layakkah tempat kerja kita disebut kantor? Atau justru lebih pas disebut (maaf) tempat sampah? Kalau masih banyak praktik kotor di dalamnya, mari mulai kita bersihkan dan jangan bermalas-malasan. Sehingga kantor itu berfungsi sebagai kantor, bukan praktik kotor.



SEKRETARIAT DPRD DAN SELURUH PEGAWAI

ADAPTASI KEBIASAAN BARU WAJIB PAKAI MASKER

#JagaKesehatan
#PakaiMasker
#JagaJarak
#PerangiCovid





PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

ADAPTASI KEBIASAAN BARU

WAJIB PAKAI MASKER



#JagaKesehatan
#PakaiMasker
#JagaJarak
#PerangiCovid